

**PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN JAMBAAN KELUARGA
DI KECAMATAN KUTALIMBARU
KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sarifah

NPP. 29.0163

Asdaf Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email:

ABSTRACT

Problem/Bacground (GAP): This final report titled “Implementation of the Family Latrine Program in Kutalimbaru subdistrict, Serdang Deli Regency, North Sumatera Province”.
Purpose: This article aims to find out about Implementation of the Family Latrine Program in Kutalimbaru subdistrict, Serdang Deli Regency, North Sumatera Province by the department of housing and residential areas. **Method:** This research uses descriptive qualitative method with inductive approach. Data collection methods used in this final report are observation, interview and documentation. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** Based on the results of research that the Implementation of the Family Latrine Program in Kutalimbaru subdistrict, Serdang Deli Regency, North Sumatera Province is still not maximal seen from the barrier factors that influence it, among others the lack of community understanding related to Family Latrine Program, social jealousy between those who receive assistance and those who do not get administrative assistance. **Conclusion:** Suggestions given from the results of this research, namely the need for wider socialization and communication related to the Family Latrine Program to the entire community, as well as increasing cooperation between the government, the unit implementation of Family Hope Program and both of those community who got help and those who did not get help.

Keywords: Implementation, Family Latrine Program, Poverty

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Program Jamban Keluarga di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”.
Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan program pembangunan jamban keluarga di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang oleh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yang menggabungkan antara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Program jamban Keluarga di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten DeliSerdang masih belum maksimal, dilihat dari masih adanya factor penghambat yang mempengaruhi hal tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terkait Program jamban Keluarga, adanya kecemburuan social antara yang mendapatkan bantuan dengan yang tidak mendapatkan bantuan. **Kesimpulan:** Saran yang diberikandari hasil peneltiian ini yaitu perlu adanya sosialisasi dan komunikasi yang lebih luas terkaitProgram jamban Keluarga kepada seluruh masyarakat, serta meningkatkan Kerjasama antara pemerintah, unit pelaksanaan Program jamban Keluarga dan masyarakat baik yangmendapatkan maupun yang tidak mendapatkan bantuan.

Kata Kunci: Implementasi, Program jamban Keluarga, Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sosial yang ada di masyarakat salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor permasalahan sosial yang terjadi di setiap daerah. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak dan baik. Menurut Sunyoto Usman (2004) dalam Roesmidi dan Riza Risyanti (2006: 95-96) bahwa kemiskinan memiliki tiga macam konsep kemiskinan, yaitu: a) Kemiskinan Absolut; b) Kemiskinan Relatif; c) Kemiskinan Subjektif.

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang nyata, dimana kebutuhan primer yang minimum seperti sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan dalam kebutuhan dasar kultur. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang beranggapan dengan adanya perbedaan dimensi waktu dan tempat, kemiskinan ini berdasar pada persepsi masyarakat dengan orientasi derajat kelayakan untuk hidup. Dan kemiskinan subjektif merupakan kemiskinan yang dirasakan oleh dirinya sendiri.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa ketidakmampuan terpenuhinya kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, papan serta kesehatan dan pendidikan termasuk kemiskinan secara absolut yang dapat dilihat secara jelas dan nyata. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat miskin menjadi persoalan disetiap harinya, untuk pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan akan diutamakan dalam pemenuhan pangan untuk bertahan hidup sehari-hari, kemudian sandang yang dipakai masih dapat digunakan dengan

keadaan yang seadanya, serta papan dalam hal ini rumah beserta isinya bagi masyarakat miskin masih tetap bertahan menggunakan rumah dan peralatan rumah tangga walaupun keadaan kebutuhan papan yang tidak layak.

Kemiskinan tidak akan jauh dengan pemukiman yang kumuh, kotor dan tidak layak. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat terkena penyakit seperti diare, typhus, gangguan kesehatan jantung. Hal ini dikarenakan mereka masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat dan menjaga lingkungan yang sehat dan bersih masih diabaikan oleh kebanyakan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan sudah diprogramkan pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan program tersebut merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin bertujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat. Salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini untuk meningkatkan pola pikir masyarakat serta memperkuat kehidupan masyarakat miskin yang lebih sejahtera agar masyarakat selalu ikut terlibat dalam program pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Latar belakang permasalahan penelitian yang saya lakukan adalah Pada tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mencatat ada empat (4) Desa yang terletak di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yaitu Desa Pasar X, Desa Namo Mirik, Desa Kutalimbaru, Desa Lau Bakeri yang masih memiliki akses sanitasi yang rendah yaitu <50% yang perlu adanya tindakan khusus bagi desa tersebut. Salah satu dari desa tersebut adalah Pasar X dengan presentasi akses sanitasi 20% menjadi perilaku akses sanitasi yang sangat rendah. Dengan adanya Program Pembuatan Jamban seharusnya sudah dapat terlaksana di atas 50% karena Program Tersebut sudah diterapkan oleh Kabupaten Deli Serdang dan seharusnya sudah berjalan dengan baik.

Kenyataannya pelaksanaan kegiatan tersebut tersendat dan tidak berjalan dengan baik, terkhusus di Kecamatan Kutalimbaru. Sehingga Pemerintah Kecamatan Kutalimbaru menargetkan agar pelaksanaan pembangunan jamban keluarga harus mencapai 75% dengan optimal, namun target tersebut belum tercapai, ini berarti bahwa target dalam pelaksanaan program pembangunan jamban keluarga yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kecamatan Kutalimbaru belum tercapai sebanyak 55% dari seharusnya 75% yang telah ditargetkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemberdayaan fakir miskin telah dilakukan oleh 3 peneliti yang dimana penelitian yang dilakukan Jefri Nuvika Ratma, 2018, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Jamban di Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten

Madiun”, penelitian yang dilakukan oleh Era Fita Lumban Gaol, 2018, “Pelaksanaan Program STBM Melalui Aksi Berjaga Dalam Rangka Meningkatkan Kepemilikan Jamban Keluarga dan Perilaku BAB Masyarakat di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2017” yang dimana dari 2 penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan-perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada metode penelitian Kuantitatif, teknik pengumpulan data wawancara dimana teknik pengumpulan data berupa Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas terpimpin.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Skripsi, Jevri Nuvika Ratma (2018) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Jamban Di Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten” Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada teknik pengumpulan data wawancara, dan fokus permasalahan yaitu membangun Jamban di setiap desa yang masih banyak membuang air sembarangan, menyadarkan masyarakat arti sebuah kesehatan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada metode penelitian Kuantitatif, teknik pengumpulan data wawancara dimana teknik pengumpulan data berupa Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas terpimpin. Hasil Penelitiannya Masyarakat di desa blimbing, masih banyak yang belum mengetahui tentang penggunaan jamban keluarga tersebut, mereka masih terbiasa dengan kehidupan yang biasa mereka lakukan, Faktor lainnya yaitu berdasarkan ekonomi di desa blimbing sebagian besar masyarakatnya mempunyai ekonomi rendah, karena sebagian besar masyarakat kabupaten madiun lebih banyak memiliki perilaku yang negative dimana faktor tersebut sangat mampu menghambat segala program yang telah ditetapkan.
2. Skripsi, Era Fita Lumban Gaol (2018) “Pelaksanaan Program Stbm Melalui Aksi Berjaga Dalam Rangka Meningkatkan Kepemilikan Jamban Keluarga Dan Perilaku BAB Masyarakat Di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi tahun 2017” Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan fokus permasalahan yaitu pelaksanaan pembangunna dalam meningkatkan kepemilikan Jamban Keluarga. Selanjutnya perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya

melakukan penelitian di lokasi Kecamatan Pegagan Hilir, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Kutalimbaru. Hasil penelitiannya Kabupaten Dairi telah melaksanakan program STBM melalui Aksi BERJAGA yaitu dengan penyuluhan seperti pemasangan spanduk stop BABS, menempelkan stiker di setiap rumah warga yang sudah memiliki jamban. Pencapaian keberhasilan untuk mewujudkan kabupaten stop BABS belum terwujud 100% khususnya di kecamatan Pegagan Hilir karna masih adanya masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Pelaksanaan Program Pembangunan Jamban Keluarga di Kecamatan Kutalimbaru pada tahun 2021
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang di hadapi pemerintah dilapangan terhadap Pembangunan Program Jamban Keluarga Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

II. METODE

Bapak dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh George Edwards III. Dimana terdapat 4 dimensi dalam teori ini yaitu Dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 34 tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori Partisipasi Politik Masyarakat maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan

memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Program Pembangunan Jamban Keluarga di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Pada pelaksanaan Program Jamban Keluarga di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, penulis melakukan penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan terkait program jamban keluarga di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Wawancara dilakukan seputar pelaksanaan program jamban keluarga, dan kendala apa saja yang terjadi ketika pelaksanaan program jamban keluarga tersebut sesuai dengan teori yang digunakan adalah menurut George C. Edward III sebagaimana dikutip Widodo (2011:97) dengan empat faktor yang sesuai dengan konsep pelaksanaannya, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Disposisi, (3) Sumber Daya, dan (4) Struktur Birokrasi.

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting penentu keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan, pengetahuan tentang apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Bila komunikasi berjalan dengan baik setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Hal ini didukung dengan wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, Bapak Heriansyah Siregar, ST.,MT pada hari senin, tanggal 10 Januari 2022 di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa :

Untuk program jamban keluarga kami memberikan tanggung jawab pada pihak Kecamatan, baik dari segi sosialisasi, pelaksanaan, hingga nanti sampai proses evaluasi, namun dari dinas perkim tetap mengiriskan tim untuk turun kelapangan, tetap di pantau oleh tim Dinas permukiman, agar cepat terlaksana. Kegiatan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat semakin bersemangat untuk menjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh penerima bantuan jamban keluarga, Ibu Malemta yang diwawancarai pada hari Kamis, 06 Januari 2022 di rumahnya bahwa:

Sosialisasi terkait dengan program jamban keluarga sudah pernah dilakukan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan. Pada kegiatan sosialisasi tersebut dijelaskan kepada masyarakat bahwa program jamban keluarga adalah bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki jamban dan septictank yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat jamban dan septictank, namun dengan demikian masih saja ada masyarakat yang belum melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah mendatangi langsung kerumah yang mendapatkan program jamban tersebut, dan langsung memberikan arahan dan nasehat kepada kami yang menerima manfaat tersebut, pemerintah berharap untuk dapat membiasakan hidup sehat dan bersih, karena sangat banyak dampak negative apabila kita membuang air besar sembarangan.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh penerima bantuan jamban keluarga, Ibu Weny Tarigan yang diwawancarai pada hari Kamis, 06 Januari 2022 di rumahnya bahwa:

Komunikasi antara pemerintah kecamatan dan desa kepada masyarakat tidak begitu terlalu berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan setiap adanya kegiatan sosialisasi terkait informasi mengenai bantuan khususnya bantuan program jamban keluarga, banyak masyarakat yang tidak ada hal ini dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus mereka kerjakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di atas bahwa pemerintah telah melakukan tugas dengan baik, dimana pemerintah Kecamatan Kutalimbaru memiliki tanggungjawab untuk mensosialisasikan Program Jamban Keluarga.

B. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau Sumber Daya Manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Dalam proses pelaksanaan program jamban keluarga di Kecamatan Kutalimbaru penanggungjawab pelaksanaan program jamban keluarga yang telah diutus oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus dapat menuntaskan proses pelaksanaan tersebut dengan penuh tanggungjawab. Pendamping pada pelaksanaan proses jamban keluarga di Kecamatan Kutalimbaru tepatnya di Desa Pasar X agar dapat menjalankan kewajibannya sehingga program bisa berjalan berkesinambungan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Bapak Heriansyah Siregar, ST., MT yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 10

Januari 2022 di kantor Dinas Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan bahwa:

Kulaitas SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan factor utama dalam menjalankan Program Jamban Keluarga, dimana dalam menjalankan Program Jamban Keluarga ini harus mempunyai kualitas sumber daya yang memadai, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang maksimal. Sampai saat ini penanggungjawab dalam proses pelaksanaan program Jamban Keluarga ini sepenuhnya pada Camat namun tetap dalam pengawasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan Camat meminta Kerjasama pada setiap Kepala Desa yang Desa nya mendapatkan Program JambanTersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kompetensi SDM yang dimiliki Unit Pelaksana Program jamban Keluarga yang ada di Kecamatan Kutalimbaru sudah cukup baik namun masih membutuhkan penambahan jumlah untuk dapat membantu kelancaran pembangunan Jamban Keluarga.

b. Informasi

Informasi dalam informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kedua informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah telah ditetapkan.

Informasi mengenai pelaksanaan Program Jamban Keluarga Kecamatan Kutalimbaru disampaikan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pertemuan kelompok yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali. Dalam penyampaian informasi dilakukan proses sosialisasi kepada penerima bantuan. Adapaun materi yang disampaikan yaitu berisi muatan informasi tentang mekanisme dan alur pelaksanaan Program Jamban Keluarga, hasil kajian dan evaluasi tentang Program Jamban Keluarga, berbagai kebijakan pelaksanaan Program Jamban Keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Bapak Heriansyah Siregar, ST., MT yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di kantor Dinas Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan bahwa:

Program jamban keluarga ini ditujukan hanya untuk masyarakat miskin yang belum memiliki jamban, apabila ada masyarakat yang belum memiliki jamban namun dia dikategorikan masih mampu maka dia tidak dapat mendapatkan bantuan, karena ini merupakan bantuan untuk masyarakat miskin guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan hidup sehat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa pemberian informasi terkait program pelaksanaan jamban keluarga belum berjalan secara maksimal, ditandai dengan masih banyak yang belum mengetahui maksud dan tujuan diberikannya dana bantuan program jamban keluarga. Hal tersebut sebaiknya menjadi acuan pihak Kecamatan untuk lebih giat lagi dalam mensosialisasikan terkait program tersebut, terkhusus penanggungjawab Desa masing-masing sehingga masyarakat yang belum bekerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan.

c. Wewenang

Wewenang meliputi tupoksi yang diberikan kepada pihak kecamatan dari pemerintah kabupaten dalam tugas camat sebagai ketua pelaksana program jamban keluarga di Kecamatan Kotalimbaru. Wewenang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perkim kepada Camat Kotalimbaru sebagai Tim Teknis Program Jamban Keluarga di Kecamatan Kotalimbaru. Dengan adanya wewenang atau penugasan tersebut dihimbau dapat melancarkan atau menyukseskan pelaksanaan Program Jamban Keluarga di Kecamatan Kotalimbaru. Wewenang maupun tupoksi yang diberikan kepada Camat Kotalimbaru sangat jelas antara lain sebagai ketua tim teknis program jamban keluarga di Kecamatan Kotalimbaru.

Dalam pemberian wewenang pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan wewenang kepada Camat Kotalimbaru untuk mengawasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan Program jamban Keluarga. Pengawasan dilakukan dengan cara Camat ikut serta dalam pertemuan awal dengan penerima bantuan dan setiap ada kegiatan Program jamban Keluarga harus melaporkan terlebih dahulu kepada Camat. Kemudian Camat memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan program jamban keluarga misalnya dalam bentuk peminjaman gedung, meja, kursi dan lain-lain.

Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Bapak Heriansyah Siregar, ST., MT yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di kantor Dinas Perumahan Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan bahwa:

Wewenang yang diberikan kepada kami dalam pelaksanaan kegiatan Program jamban Keluarga berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat, sehingga petugas dalam penanggungjawab pelaksanaan jamban keluarga dilapangan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi, Kecamatan Kotalimbaru diberikan tanggung jawab untuk meninjau Kembali bagaimana pelaksanaan Program jamban Keluarga dengan bekerjasama pada desa-desa dan kelurahan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para Petugas Pelaksanaan Program Jamban Keluarga dalam Implementasi Program jamban Keluarga dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kotalimbaru telah bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Mereka saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing dan membangun kerjasama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa petugas Pelaksana Program Jamban Keluarga telah mengerti dan memahami wewenang masing-masing dan mampu berkoordinasi dengan baik.

C. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif yang berbeda

dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif. Dalam disposisi terdapat dua indikator yang mempengaruhinya yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.

a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan. Pengangkatan Birokrat yang ada di Kecamatan Kutalimbaru sudah sangat baik dimana para pegawainya sudah cukup berpengalaman secara keseluruhan.

Bapak Heriansyah Siregar, ST., MT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang (Senin, 10 Januari 2022)

kami memilih langsung yang dapat bertanggungjawab dalam pelaksanaan program ini, yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut, agar semuanya bisa berjalannya dengan baik, karena saya menyadari terkait dengan kekurangan sumber daya manusia sehingga kami memilih memperhatikan betul dengan pengalaman kerja mereka agar tidak memakan waktu yang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan tenaga kerja dalam proses pelaksanaan program jamban keluarga sesuai dengan pengalaman yang baik.

b. Insentif

Insentif adalah program yang diberikan oleh atasan dengan tujuan agar bawahan dapat lebih tekun dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki berkeinginan untuk meningkatkan prestasi kerja setiap harinya.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Bapak Bapak Heriansyah Siregar, ST., MT yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di kantor Dinas Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan bahwa:

Dana insentif yang diberikan kepada seluruh anggota tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan dalam setiap kegiatan yang turun di lapangan dalam hal ini operasional tenaga kerja di lapangan telah diatur dan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pendamping pelaksanaan program jamban keluarga telah diberikan dan insentif yang diberikan kepada setiap penanggungjawab pada pelaksanaan program jamban keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pegawai dan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya telah mendapatkan dana insentif sebagai penunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

D. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi.

Hasil wawancara dengan Camat Kutalimbaru Bapak Rio Laka Dewa S.STP., MAP pada hari Selasa 11 Januari 2022 mengatakan bahwa:

Untuk Standar Operasional Prosedur sendiri telah ada langsung dari Kementerian Kesehatan yang penjelasannya cukup lengkap di dalam buku pedoman pelaksanaan teknis STBM, namun tetap untuk para peserta Program Jamban Keluarga tetap diarahkan oleh para penanggungjawab agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kegiatan Program Jamban Keluarga yang dilakukan oleh tenaga kerja telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dan terukur dengan jelas sehingga mendapatkan gambaran bagaimana keberhasilan suatu pelaksanaan Program Jamban Keluarga dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kutalimbaru sudah melaksanakan struktur Birokrasi dengan sebaik-baiknya dan cukup tepat dalam hal kesesuaian pemberian tupoksi kepada para pelaksana penanggungjawab program jamban keluarga dengan peraturan yang ada dan telah ditetapkan.

3.2. Kendala yang dihadapi Pemerintah di lapangan dalam Pembangunan Program Jamban Keluarga di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

1. Kecemburuan sosial yang terjadi antara Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tidak menerima bantuan PJK dengan KSM yang telah menjadi anggota PJK yang disebabkan oleh data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak sesuai dengan yang ada di lapangan padahal mereka juga memenuhi persyaratan dengan KSM yang telah menjadi anggota peserta PJK.
2. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap PJK disebabkan oleh pembinaan terhadap KPM masih terkendala waktu dan kesibukan dari penerima bantuan untuk bekerja.
3. Banyaknya warga miskin yang belum menjadi peserta PJK.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Pembangunan Jamban Keluarga di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Untuk program jamban keluarga kami memberikan tanggungjawab pada pihak Kecamatan, baik dari segi sosialisasi, pelaksanaan, hingga nanti sampai proses evaluasi, namun dari dinas perkim tetap mengirimkan tim untuk turunkelapangan, tetap di pantau oleh tim Dinas permukiman, agar cepat terlaksana. Kegiatan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat semakin bersemangat untuk menjaga lingkungan yang sehat dan bersih. Terkait dengan komunikasi antara pihak kecamatan dengan desa berjalan dengan baik, dikarenakan kami

sering mengadakan rapat, namun terkadang yang menjadi kendala antara kecamatan dengan kabupaten yaitu Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kami tidak sering melakukan rapat sehingga sering terjadi kesalahan informasi.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan terkait tentang penghambatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Jamban Keluarga di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara harus bisa melaksanakan tugasnya dengan dasar kemanusiaan dan humanis namun tetap tegas dan efektif dalam faktor yang lebih merugikan sehingga diperlukan perbaikan. Terakhir, dana pelaksanaan program pembangunan jamban keluarga bisa terlaksanakan karena ada bantuan dari pemerintah pusat sehingga perlahan pembangunannya program jamban keluarga dapat terlaksana dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Jamban Keluarga di Kecamatan Kutalimbaru dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari keempat dimensi penelitian, ada 2 (dua) dimensi masih perlu ditingkatkan yaitu dimensi komunikasi dan sumber daya.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program jamban keluarga di Kecamatan Kutalimbaru adalah kecemburuan sosial yang terjadi antara masyarakat yang mendapatkan bantuan dan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, kurangnya pemahaman terhadap program jamban keluarga, masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Jamban Keluarga di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yang menjadi kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Keterbatasan ini berupa waktu yang dilakukan dalam meneliti permasalahan di lapangan sangat minim. Hal ini tentunya membuat peneliti hanya menemukan permasalahan di dasar, penelitian ini belum digali secara mendalam serta terperinci dikarenakan waktu dalam pelaksanaan penelitian yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan program pembangunannya jamban keluarga di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Deli Serdang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Alamsyah, Dedi Dan Ratna Mulia Wati. 2013. *Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. NuhaMedika. Yogyakarta

Creswell, John. 2016. *Research Design*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Harun, Rochajat., & Ardianto, Elvinaro. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers, Jakarta

Wahab, A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Program Pembangunan Yang Berkeadilan*

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

C. JURNAL

Tato, Y. (2017). Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur di Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan (Bandiklatlitbang) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 1(1), 263-285.

Rudiadi, R., Ilosa, A., & Al Sukri, S. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 44-58.

Jefri, N. R. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN JAMBAN DI DESA BLIMBING KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN.

Gaol, E. F. L. (2017). Pelaksanaan Program STBM melalui Aksi BERJAGA dalam Rangka meningkatkan kepemilikan jamban keluarga dan perilaku BAB masyarakat di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi tahun 2017.

A. Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.2021. Kabupaten Deli Serdang dalam Angka 2021 di <https://deliserdangkab.bps.go.id/> (diakses 4 September 2021)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.2018. Kecamatan Kotalimbaru dalam Angka 2018 di <https://deliserdangkab.bps.go.id/> (diakses 4 September 2021)



